

GARIS KEMISKINAN DAN KEMISKINAN “ECOPOS”

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

GARISKEMISKINANDAN KEMISKINAN“ECOPOS”

Editor:
Carunia Mulya Firdausy

LIPI Press

© 2020 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Ekonomi

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Garis Kemiskinan dan Kemiskinan Ecosos/Carunia Mulya Firdausy. Jakarta: LIPI Press, 2020.
xix + 255 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-496-124-4 (cetak)
978-602-496-125-1 (e-book)

1. Garis Kemiskinan

2. Ecosos



362.5

Copy editor : Martinus Helmiawan dan Heru Yulistiyana
Proofreader : Sonny Heru Kusuma
Penata Isi : Vidia Cahyani dan Meita Safitri
Desainer Sampul : D.E.I.R. Mahelingga

Cetakan I : Juni 2020



LIPI

Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp.: (021) 573 3465
e-mail: press@mail.lipi.go.id
website: lipipress.lipi.go.id
 LIPI Press
 @lipi_press

DAFTAR ISI

Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	ix
Pengantar Penerbit	xi
Kata Pengantar	xiii
Prakata	xvii
BAB 1 GARIS KEMISKINAN ECOPOS: PENGANTAR	
Carunia Mulya Firdausy	1
BAB 2 KONSEP DAN UKURAN PENGUKURAN KEMISKINAN: TELAAH PUSTAKA	
Abuzar Asra	13
BAB 3 VARIABEL, DIMENSI, DAN INDIKATOR GARIS KEMISKINAN ECOPOS	
Carunia Mulya Firdausy	49
BAB 4 PENCAPAIAN KERJA LAYAK MELALUI PENANGGULANGAN KEMISKINAN ECOPOS SEKTOR INFORMAL	
Nawawi.....	71
BAB 5 DIMENSI ECOPOS KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
Agus Eko Nugroho.....	109
BAB 6 KEMISKINAN ECOPOS DALAM DIMENSI AGRARIA	
Lilis Mulyani.....	139

BAB 7 DIMENSI ECOPOS UNTUK OPTIMALISASI SIDA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PETANI	
Rachmini Saparita	161
BAB 8 DIMENSI ECOPOS DALAM PENGURANGAN KEMISKINAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM	
Purwanto.....	187
BAB 9 GK DAN KEMISKINAN ECOPOS: CATATAN AKHIR	
Carunia Mulya Firdausy	235
Indeks.....	247
Biografi Penulis.....	251



BAB I GARIS KEMISKINAN ECOPOS: PENGANTAR

Carunia Mulya Firdausy

A. PENTINGNYA GARIS KEMISKINAN ECOPOS

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia turun dari 10,12% menjadi 9,66%. Jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang 910.000 orang dari 26,58 juta orang menjadi 25,67 juta orang. Bukan itu saja, indeks kedalaman dan indeks keparahan pun menurun. Indeks kedalaman kemiskinan, misalnya, turun dari 1,79 menjadi 1,63. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan berkurang dari 0,46 menjadi 0,41. Angka-angka penurunan tersebut terjadi dalam satu tahun sejak September 2017 sampai September 2018 (BPS, 2019).

Dari angka-angka penurunan kemiskinan tersebut, banyak hal yang menarik untuk didiskusikan. Salah satunya menyangkut garis kemiskinan yang dipakai dalam menghitung jumlah penduduk miskin selama ini (Firdausy, 2019). Dalam hal ini, garis kemiskinan (GK) yang dipakai masih menggunakan pendekatan satu variabel berdasarkan nilai pendapatan atau pengeluaran yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)¹.

¹ Garis kemiskinan BPS menggunakan pendekatan berdasarkan pada pengeluaran dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (PS). Definisi kemiskinan yang digunakan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam penentuan garis kemiskinan tersebut, cara yang dilakukan adalah menghitung

GK BPS unidimensional tersebut dalam berbagai literatur² dinyatakan memiliki beberapa kelemahan. Pertama, GK resmi, khususnya untuk GK makanan, hanya berdasarkan pada kebutuhan kalori sehingga menyebabkan GK yang digunakan menjadi rendah karena kalori dapat dipenuhi dengan komponen makanan tinggi kalori yang cenderung berharga rendah, misalnya beras. Dalam kenyataannya, kebutuhan nutrisi juga mencakup zat nutrisi lain, seperti protein³, yang belum diperhitungkan dalam GK resmi BPS.

Kedua, pemilihan 52 jenis komoditas bukan makanan masih dapat dipertanyakan keabsahannya, karena penentuan ini bisa bersifat "*arbitrary*" dan penentuan ini menentukan rendah atau tingginya GK. Ketiga, dengan diturunkannya secara terpisah GK perdesaan dan GK perkotaan, bisa saja terjadinya kedua GK tersebut tidak terbanding secara sempurna dalam hal perbedaan tingkat kehidupan (*standard of living*) antara perdesaan dan perkotaan. Bila hal ini terjadi, gambaran yang terjadi dalam suatu periode bisa menyesatkan (*misleading*).

Contoh sederhananya adalah sebagai berikut. Seseorang yang tidak miskin di perdesaan (mempunyai pendapatan sedikit di atas GK perdesaan) berpindah ke perkotaan dan mengalami kenaikan pendapatan serta standar kehidupannya. Akan tetapi, karena GK perkotaan "lebih tinggi" dibandingkan GK perdesaan (yang tak sebanding dengan perbedaan standar kehidupan antara perdesaan dan perkotaan), orang tersebut bisa saja tercatat sebagai "miskin" di perkotaan, sehingga dalam kasus ini jumlah orang miskin se-

besarnya pengeluaran seseorang dalam memenuhi kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per hari ditambah dengan pengeluaran untuk 52 jenis komoditas bukan makanan yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (Asra, 2011). Dengan demikian, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan tersebut.

2 Misalnya, Asra (2000).

3 Filipina dalam penghitungan garis kemiskinannya menggunakan kebutuhan kalori dan protein sebagai patokan.

cara keseluruhan meningkat. Padahal, yang sesungguhnya terjadi adalah suatu hal positif, yakni seseorang tidak miskin di perdesaan telah mengalami kenaikan tingkat pendapatan dan standar kehidupan (dengan pindah ke perkotaan), akan tetapi secara "tidak perlu" (*unnecessarily*) tercatat sebagai orang miskin di perkotaan akibat perbedaan GK perdesaan dan perkotaan yang tak terbanding dalam aspek tingkat kehidupan (*inconsistent in terms of standard of living*).⁴

Keempat, kelemahan dalam penggunaan rata-rata per kapita konsumsi kalori yang disarankan, yaitu sebesar 2.100 kilo kalori per kapita per hari, tanpa memperhatikan komposisi anggota rumah tangga menurut umur. Dengan demikian, bisa saja suatu rumah tangga dengan komposisi anggota rumah tangga yang cenderung mengelompok pada usia muda, misalnya, di bawah 10 tahun, mempunyai kebutuhan kalori per kapita yang kurang dari 2.100 kilokalori, sedangkan rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga yang sama, tetapi dengan komposisi umur yang berbeda, akan membutuhkan kalori per kapita yang lebih besar dari 2.100 kilokalori. Dengan kata lain, bisa saja terjadi kesalahan identifikasi rumah tangga miskin yang selama ini terjadi, yang menggunakan GK berdasarkan pada pengeluaran yang dihitung dari rata-rata kalori per kapita 2.100 kilokalori per hari. Akibatnya, jumlah penduduk yang terdata sebagai penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah GK pendapatan/pengeluaran saja. Penduduk miskin di luar ukuran pendapatan/pengeluaran yang disebabkan oleh: (1) ketidakberdayaan memperoleh bantuan pemerintah dan non-pemerintah; (2) ketidakmampuan untuk menjalankan fungsinya dalam masyarakat baik karena rendahnya pendidikan; (3) ketidakmampuan berobat ke dokter atau

4 Pembahasan lebih lengkap dapat dibaca di Asra dan Santos-Francisco (2003), "Poverty Line: Eight Countries' Experiences and Issue of Specificity and Consistency", dalam *Reducing Poverty in Asia: Emerging Issues in Growth, Targeting and Measurement*, C. Emonds (Ed.). UK: Edward Elgar. Asra (1999) menunjukkan bahwa untuk setiap tahun 1987, 1993, dan 1996, perbandingan GK perkotaan dengan GK perdesaan jauh lebih tinggi dari perbandingan harga komoditas makanan dan nonmakanan di antara kedua daerah tersebut.

institusi kesehatan; (4) tidak layaknnya pekerjaan yang dilakukan; (5) rendahnya kepercayaan diri; (6) tidak adanya perasaan aman; (7) lingkungan yang rentan bencana; (8) minimnya aset dan akses pemilikan tanah; (9) rendahnya akses kredit usaha; (10) rendahnya kemampuan berinovasi; serta (11) kebebasan politik (seperti berbicara menyatakan pendapat), tidak terungkap dalam angka jumlah penduduk miskin berbasis GK resmi BPS yang digunakan selama ini.

Oleh karena itu, tampaknya diperlukan penetapan GK yang lebih luas untuk memahami kemiskinan yang sifatnya multi-dimensi. Dalam buku ini, penetapan GK tersebut disingkat dengan terminologi Ecosos (*empowerment, capability, opportunity, dan security*). Alasan pentingnya penetapan GK Ecosos ini didasarkan pada perkembangan penggunaan GK tersebut di beberapa negara, seperti di India dan China, serta karena penggunaan GK Ecosos membuat kebijakan pengentasan masyarakat dari kemiskinan menjadi lebih integral dan berkelanjutan (baca, misalnya, Alkire 2011; Alkire & Santo 2011; Bank Dunia 2011; dan Sen 1999).

Dengan demikian, penggunaan GK Ecosos memberikan lima keuntungan. Pertama, GK dan kemiskinan Ecosos yang ditetapkan menjadi lebih realistis karena tidak sebatas menggunakan variabel pengeluaran penduduk untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan saja. Kedua, rumusan serta penetapan kebijakan, strategi, dan program pengentasan penduduk dari kemiskinan dapat lebih berhasil guna dalam meningkatkan kualitas kehidupannya. Ketiga, mempertajam upaya identifikasi variabel-variabel dan/atau dimensi Ecosos penyebab kemiskinan, sehingga membantu penetapan target intervensi mengatasi kemiskinan secara tepat dan tuntas. Keempat, membantu pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan secara utuh. Kelima, mengevaluasi efektivitas lembaga yang mengimplementasikan kebijakan, strategi, dan program pengentasan masyarakat dari kemiskinan (Haughton & Khandker, 2012).

Persoalannya sekarang, dimensi dan indikator dari variabel Ecopos yang manakah yang harus digunakan dalam menetapkan GK Ecopos? Apakah semua atau hanya beberapa variabel, dimensi, dan indikator yang diungkapkan Alkire (2011), Alkire dan Santos (2011), Bank Dunia (2000), serta Sen (1999) saja yang harus dirujuk dalam menentukan GK Ecopos tersebut? Ataukah semua atau sebagian variabel, dimensi, dan indikator GK Ecopos yang disarankan dalam literatur di atas perlu dimodifikasi dan disesuaikan sedemikian rupa sesuai dengan konteks Indonesia? Ataukah GK Ecopos yang ditetapkan tidak perlu merujuk pada variabel, dimensi, dan indikator yang secara empiris telah ditetapkan dalam literatur di atas?

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut di atas, telah dikumpulkan data dari penduduk miskin dan tidak miskin pada beberapa sektor, yakni sektor informal dan pertanian ataupun dari penduduk miskin dan tidak miskin yang tidak memiliki lahan, sebagai nasabah KUR, serta penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana. Justifikasi target responden yang beragam tersebut didasarkan paling tidak pada empat pertimbangan. Pertama, besar kemungkinan penduduk dalam kategori yang dimaksudkan di atas sebagian terbesar adalah penduduk miskin atau rentan terhadap kemiskinan. Kedua, dengan keberagaman sumber data tersebut, diharapkan persepsi kemiskinan Ecopos yang menjadi fokus kajian ini dapat lebih memadai dan mewakili komponen penduduk dalam kategori miskin. Ketiga, kebijakan yang ditargetkan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan banyak diarahkan kepada penduduk dalam kategori tersebut di atas. Keempat, upaya pemerintah dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dalam lingkup kegiatan di atas ternyata masih belum optimal sehingga perlu diteliti faktor-faktor penyebabnya.

Buku bunga rampai ini memfokuskan uraian dan pembahasannya pada GK dan kemiskinan Ecopos dengan menggunakan rujukan utama pada konsep empiris dalam literatur-literatur sebelumnya yang dihadapkan dengan temuan lapangan penelitian

terhadap penduduk miskin yang memiliki keragaman kegiatan hidupnya. Instrumen-instrumen penelitian yang digunakan, selain studi empiris literatur dan *web search*, adalah daftar pertanyaan dan wawancara mendalam kepada sampel responden di lokasi-lokasi penelitian (detail untuk lokasi, unit analisis, dan cara *sampling* diberikan di tiap bab di buku ini) yang kemudian dianalisis serta ditentukan variabel, dimensi, dan indikatornya yang dipersepsikan penting dalam memformulasikan GK dan kemiskinan Ecopos. Hasil analisis temuan lapangan tersebut kemudian didiskusikan lagi melalui FGD di tiap lokasi penelitian dan seminar di LIPI serta dengan memperhatikan masukan pikiran yang berkembang dalam diskusi dan seminar yang dilakukan Bappenas, SMERU, Forum Masyarakat Statistik Indonesia, ataupun perkembangan isu ini, khususnya artikel opini di media surat kabar nasional sampai 2018.

Proses panjang dalam penelusuran serta penetapan variabel, dimensi, dan indikator GK dan kemiskinan Ecopos di atas dimaksudkan antara lain agar dimensi dan indikator dari tiap variabel Ecopos dalam menentukan GK dan kemiskinan Ecopos lebih tajam, orisinal, dan bukan merupakan konfirmasi atau pengulangan (*copy cat*) dari konsep empiris GK Ecopos yang telah ada dalam literatur. Di sinilah letak kelebihan buku bunga rampai ini.

Adapun ruang lingkup dari buku ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, fokus penelitian menekankan pada persepsi dimensi dan indikator GK Ecopos oleh penduduk miskin dan tidak miskin yang bekerja pada sektor informal dan pertanian ataupun dari penduduk miskin dan tidak miskin yang tidak memiliki lahan, sebagai nasabah KUR, dan penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana. Kedua, variabel, dimensi dan indikator GK Ecopos yang digunakan berasal dari literatur, khususnya dari Alkire (2011), Alkire dan Santo (2011), Bank Dunia (2011), Sen (1999), serta sumber rujukan lain yang disebutkan dalam tiap bab. Selain itu, dilakukan beberapa penyesuaian terhadap dimensi dan indikator GK Ecopos yang relevan diterapkan di Indonesia. Ketiga,

sumber data yang dikumpulkan diperoleh dari penelitian kuantitatif dengan penggunaan instrumen daftar pertanyaan dan penelitian kualitatif dengan instrumen FGD, wawancara mendalam, dan pengamatan langsung di tiap lokasi penelitian. Keempat, pembahasan hasil dan diskusi temuan penelitian ini sepenuhnya diambil dari hasil penelitian dan dikonfirmasi dengan rujukan yang sesuai pada tiap bab.

B. URAIAN ISIBUKU

Buku bungarampai ini terdiri atas 9 bab. Bab I merupakan bab pengantar singkat untuk mengetahui latar belakang dan rasionalitas apa dan mengapa penetapan GK dan kemiskinan Ecopos penting untuk dilakukan. Dalam bab ini, dijelaskan antara lain bahwa GK yang digunakan dalam menghitung jumlah penduduk miskin selama ini memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang dimaksudkan bukan hanya terkait dengan penyederhanaan GK yang didasarkan pada perhitungan satu variabel pengeluaran makanan dan nonmakanan, tetapi juga menyangkut penetapan GK yang tidak disesuaikan dengan daerah tempat penduduk miskin menetap. Selain kelemahan GK resmi tersebut, penjelasan pentingnya GK dan pemahaman kemiskinan Ecopos bagi rumusan kebijakan, strategi, dan program pengentasan masyarakat dari kemiskinan juga diungkapkan dalam bab ini.

Bab II berisi telaah pustaka tentang konsep dan ukuran yang dipakai dalam mengukur kemiskinan. Telaah pustaka ini ditujukan untuk melihat kembali dan *updating* pengetahuan pembaca tentang dinamika perkembangan ukuran mengukur kemiskinan, aspek pengukuran, aspek penyebab kemiskinan, dan jenis-jenis GK yang berkembang secara umum selama ini, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, penjelasan dalam subbab awal dalam bab ini dimulai dengan uraian sejarah perkembangan pengukuran kemiskinan dari waktu ke waktu. Kemudian, diikuti dengan uraian konsep dan definisi dari aspek pengukuran kemiskinan. Juga didiskusikan konsep pengukuran kemiskinan secara objektif

dalam kelompok statis dan dinamis serta uraian GK yang berkembang di Indonesia, baik resmi maupun nonresmi serta kelemahan dari GK tersebut.

Bab III berfokus pada dua hal pokok. Pertama, menjelaskan variabel, dimensi, dan indikator dari GK Ecopos yang diungkapkan dalam literatur. Sumber rujukan literatur yang digunakan khususnya berasal dari Alkire dan Santos (2011), Bank Dunia (2000; 2001), serta Sen (1999). Kedua, mengungkapkan temuan dan analisis lapangan menyangkut persepsi penduduk miskin dan tidak miskin yang menjadi sampel penelitian menyangkut variabel, dimensi, dan indikator yang perlu diperhatikan untuk menetapkan GK Ecopos. Instrumen yang digunakan dalam menggali persepsi sampel responden dalam menetapkan variabel, dimensi, dan indikator untuk GK Ecopos diperoleh dari jawaban kuesioner oleh 100 responden di perdesaan dan perkotaan di setiap lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Bogor (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Palembang (Sumatra Selatan), Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), dan Lombok (Nusa Tenggara Barat).

Sementara itu, variabel, dimensi, dan indikator GK Ecopos pada Bab III berasal dari persepsi sampel responden tanpa memperhatikan status pekerjaan dan/atau kategori tertentu, pada Bab IV sampai Bab VIII diungkapkan persepsi responden menyangkut GK dan kemiskinan Ecopos dari perspektif pekerja sektor informal, nasabah kredit usaha rakyat (KUR), petani berlahan marginal, petani penerima inovasi pertanian dalam program Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan penduduk miskin yang tinggal di daerah rentan perubahan iklim.

Bab IV, misalnya, membahas upaya pencapaian kerja layak melalui penanggulangan kemiskinan Ecopos di sektor informal. Dalam bab ini antara lain dijelaskan konsep dan dimensi kerja layak. Dilanjutkan dengan uraian konsep kemiskinan Ecopos dengan kerja layak dan bagaimana implikasi dan strategi penanggulangan kemiskinan Ecopos untuk mencapai kerja layak bagi

sektor informal. Pemilihan kategori pekerja informal ini didasarkan pada alasan bahwa pekerjaan informal cenderung didominasi oleh penduduk miskin untuk bertahan hidup. Bahkan, banyak dari pekerja informal telah berhasil memperoleh pendapatan/pengeluaran di atas GK resmi BPS. Dengan adanya catatan tersebut, diyakini pekerja informal mempunyai persepsi dan gagasan tentang dimensi dan indikator dari setiap variabel Ecopos yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan kemiskinan Ecopos dan GK Ecopos.

Bab V mengungkapkan persepsi responden sebagai nasabah kredit usaha rakyat (KUR) terkait dimensi Ecopos dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Dalam bab ini, dikaji kinerja KUR dalam penanggulangan kemiskinan dan dimensi Ecopos (*empowerment, capability, opportunity, dan security*) dalam program KUR. Namun, sebelum kedua pokok tersebut diungkapkan, diberikan latar belakang singkat tentang perkembangan kemiskinan dan aksesibilitas KUR dalam mengatasi kemiskinan serta bagaimana kinerja finansial program KUR dalam mengatasi kemiskinan. Pemilihan unit analisis nasabah KUR di sektor informal juga atas pertimbangan bahwa nasabah KUR umumnya juga didominasi oleh penduduk miskin. Nasabah KUR melakukan pinjaman kredit agar dapat keluar dari kemiskinan.

Bab VI membahas hasil penelitian terkait kemiskinan Ecopos dalam pemilikan aset tanah/lahan pertanian (agraria). Perhatian terhadap masalah pemilikan aset tanah ini antara lain disebabkan eratnya hubungan antara kemiskinan dan pemilikan lahan oleh petani. Akibatnya, banyak petani atau penduduk desa yang harus bermigrasi ke kota dan hidup di perkampungan kumuh atau bantaran sungai/kali atau tanah-tanah milik perusahaan negara yang belum digunakan. Pada akhirnya, kemiskinan di perdesaan berpindah ke perkotaan. Oleh karena itu, pemahaman GK dan kemiskinan Ecopos dari petani yang berlahan marginal ditelusuri dalam bab ini. Adapun materi yang dibahas di sini antara lain menyangkut relasi pemilikan lahan dan kemiskinan, implikasi

ketiadaan lahan dan target reforma agraria, serta bagaimana pentingnya aset dan akses lahan sebagai faktor kunci reforma agraria.

Bab VII ditujukan untuk mendiskusikan dimensi dari tiap variabel Ecopos untuk mengoptimalkan SIDA bagi pengentasan petani dari kemiskinan. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan penjelasan menyangkut pelaksanaan SIDA, kemudian diuraikan tentang dimensi dari tiap variabel Ecopos untuk optimalisasi SIDA dalam pengentasan petani dari kemiskinan dan bagaimana implikasi Ecopos dalam pelaksanaan SIDA. Program SIDA ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu strategi percepatan pengurangan kemiskinan petani. Dalam program ini, sistem inovasi daerah yang diperkenalkan ialah penggunaan teknologi pertanian di dua daerah, yakni Kabupaten Subang, Jawa Barat; dan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua kabupaten ini dipilih karena telah melakukan pelaksanaan SIDA di sektor pertanian. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data ialah FGD (*focus group discussion*) dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), khususnya di Kecamatan Pagaden dan Patok Besi, serta dengan Pemerintah Kabupaten Subang, yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Adapun di Kabupaten Belu, NTT, pengumpulan data melalui FGD dilakukan dengan petani sasaran kegiatan, sementara dialog interaktif dilaksanakan dengan pemerintah daerah dan dengan para tokoh masyarakat.

Bab VIII berisi pembahasan menyangkut dimensi dari tiap variabel Ecopos yang harus diakomodasi dalam strategi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim untuk mengurangi kemiskinan. Sumber data untuk mendiskusikan hal tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu, Sulawesi Tengah, dan kawasan Cagar Biosfer Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Data yang dimaksudkan dikumpulkan dari hasil pengamatan langsung, wawancara menggunakan daftar pertanyaan, dan *focus group discussion* (FGD) dengan narasumber terpilih di kedua kawasan. Pemilihan kedua kawasan sebagai lokus

penelitian didasarkan, antara lain, pada pertimbangan sebagai berikut. Pertama, kedua kawasan tersebut dari aspek ekologis mewakili tipe ekosistem yang berbeda, yaitu Cagar Biosfer Lore Lindu, Sulawesi Tengah, mewakili kawasan terestrial dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Sementara kawasan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, mewakili kawasan pulau-pulau kecil, pantai, dan wilayah laut. Kedua, dua kawasan tersebut dapat memberikan gambaran data dan informasi yang lebih bervariasi tentang pengetahuan masyarakat lokal mengenai cara pengelolaan sumber daya alam hayati, kegiatan produksi, serta strategi adaptasi dan mitigasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim di kawasan tersebut.

Akhirnya, pada Bab IX diungkapkan catatan akhir dari seluruh pembahasan dari bab-bab sebelumnya untuk mempertajam kembali konsep GK dan Kemiskinan Ecopos. Catatan akhir dalam bab ini diawali dengan apa yang dimaksud sebagai GK Ecopos dengan segala dimensi dan indikator yang diungkapkan dalam literatur. Kemudian, dilanjutkan dengan penjelasan temuan hasil penelitian lapangan yang terkait dengan dimensi dan indikator dari GK Ecopos dan pemahaman kemiskinan Ecopos oleh pekerja di sektor informal, nasabah KUR, petani berlahan marginal, petani penerima SIDA, dan penduduk di kawasan rentan perubahan iklim. Selanjutnya, ditutup dengan kesimpulan dan implikasi dari temuan hasil penelitian ini dalam menetapkan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan Ecopos.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S. (2011). Multidimensional poverty and its discontents. Dalam *Proceedings of the 8th AFD-EUDN Conference, 2010*. France: AFD/EUDN.
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2011). *Acute multidimensional poverty: A new index for developing countries* (OPHI Working Paper No. 38, hlm. 10 – 22).

- Asra, A. (2011). *Kemiskinan perkotaan: Perkembangan, determinan, dan strategi pengentasannya*. Jakarta: BPS.
- Asra, A. (2000). Poverty and inequality in Indonesia: Estimates, decomposition and key issues. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 5(1/2), 57 – 79.
- Asra, A. (1999). Urban-Rural differences in costs of living and their impact on poverty measures. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 35(3), 56 – 78.
- Asra, A., & Santos-Francisisco, V. (2003). Poverty line: Eight countries' experiences and issue of specificity and consistency. Dalam C. Edmonds (Ed.), *Reducing poverty in Asia: Emerging issues in growth, targeting and measurement*. UK: Edward Elgar.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kemiskinan 2019 di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Bank Dunia. (2000). *World development report 2000*. Washington D.C.: World Bank.
- Bank Dunia. (2001). *World development report 2001*. Washington D.C.: World Bank.
- Firdausy, C. M. (2019, February 2). Mempersempit disparitas kemiskinan. *Kompas*, p.7.
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2012). *Guides of poverty and income inequality*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Sen, A. K. (1999). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.



BAB III

VARIABEL, DIMENSI, DAN INDIKATOR GARIS KEMISKINAN ECOPOS

Carunia Mulya Firdausy

A. PENGANTAR

Seperti sudah dibahas di akhir Bab II, garis kemiskinan (GK) resmi yang hanya berbasis pengeluaran (unidimensional) sudah disadari memiliki kelemahan yang perlu dilengkapi. Dengan kata lain, estimasi jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia bisa tidak secara komprehensif mencerminkan realitas kemiskinan yang dihadapi penduduk, yang sebenarnya bersifat multidimensi. Di samping itu, walaupun kemiskinan multidimensi telah dilakukan BPS (dalam Ningrum, Thaariq, Sagala, & Aidha, 2019), serta Budiantoro (2015), cakupan dimensi yang digunakan masih terbatas pada pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan yang cakupannya lebih luas, atau dalam buku ini disebut dengan Pengukuran Ecosos (*empowerment, capability, opportunity, dan security*), penting untuk dikaji secara detail dan mendalam.

Namun, sebelum detail pembahasan dari variabel, dimensi, dan indikator GK Ecosos didiskusikan lebih lanjut, di bagian subbab B berikut ini dijelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai latar belakang apa dan mengapa konsep GK Ecosos diungkapkan di dalam literatur. Kemudian, di bagian subbab C dilanjutkan pembahasan menyangkut dimensi dan indikator-indikator dari tiap variabel Ecosos yang diungkapkan dalam literatur-literatur.

Setelah itu, pembahasan berikutnya menyangkut temuan hasil penelitian lapangan terkait variabel, dimensi, dan indikator dalam menentukan GK Ecopos di subbab D. Akhirnya, kesimpulan dari bab ini diberikan di subbab E.

Untuk dicatat di sini, pembahasan dan argumentasi yang diungkapkan dalam bab ini bersumber dari hasil temuan lapangan melalui survei kualitatif dan kuantitatif, baik dengan cara wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD), maupun penyebaran daftar pertanyaan, kepada sampel 100 rumah tangga miskin dan nonmiskin di tiap daerah perkotaan dan daerah perdesaan pada 2015. Daerah perkotaan dan perdesaan terpilih sebagai lokasi penelitian ialah Kota Surabaya, Jawa Timur; Kota Semarang, Jawa Tengah; dan Desa Babakan Pendeuy, Bogor, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih terutama karena penelitian yang sebelumnya dilakukan pada 2013 dan 2014. Juga karena pemilihan lokasi kota dan desa ini diyakini dapat mewakili respons dari masyarakat kota dan desa. Sementara itu, para narasumber yang dilibatkan dalam diskusi melalui FGD tidak hanya terbatas pada kalangan akademi-si dari berbagai disiplin ilmu, khususnya disiplin ilmu sosiologi, antropologi, dan ekonomi, tetapi juga para praktisi dan birokrat yang berasal dari satuan kerja pemerintahan daerah (SKPD) di tiga provinsi tersebut di atas.

Selain itu, FGD dilakukan dengan narasumber yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi masyarakat lainnya. Catatan, untuk diketahui, selain lokasi penelitian di Jawa tersebut, penelitian lapangan telah dilakukan di daerah perdesaan dan perkotaan di luar Jawa, seperti Palembang, Sumatra Selatan; Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan; Pontianak, Kalimantan Barat; dan Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Adapun lokasi penelitian di Provinsi Sumatra Selatan adalah Kota Palembang, sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat masing-masing adalah kota kecil Gowa, Kota Pontianak, dan Lombok Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini terutama berdasarkan pada masukan pihak

Kantor Statistik BPS setempat. Di Kota Palembang, misalnya, proporsi penduduk miskin sampai 2019 masih di atas dua digit, yakni sebesar 13,56%. Angka ini bahkan di atas angka kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan sebesar 12,82%. Demikian pula di Lombok Barat (NTB) dan kota kecil Gowa (Sulawesi Selatan), angka kemiskinan sampai 2018 masing-masing masih di atas angka kemiskinan nasional, yakni 15,20% dan 11,23% (BPS, 2018).

Dalam operasionalisasi variabel, dimensi, dan indikator GK Ecopos (*empowerment, capability, opportunity, dan security*) harus diakui tidak sepenuhnya berasal dari pikiran narasumber dan para peserta FGD, tetapi juga menggunakan konfirmasi rujukan literatur. Hal ini dimaksudkan agar variabel, dimensi, dan indikator dari GK Ecopos yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dikonfirmasi dengan variabel, dimensi, dan indikator Ecopos yang diungkapkan dalam literatur. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperluas dan atau mengkritisi GK Ecopos yang diungkapkan dalam literatur dan sekaligus menetapkan variabel, dimensi, dan indikator GK Ecopos yang bersifat spesifik dan khas untuk Indonesia.

B. APA DAN MENGAPA GK ECOPOS?

Konsep dan pemikiran penetapan GK Ecopos (*empowerment, capability, opportunity, dan security*), sesuai dengan sebutannya, bukan berasal dari Indonesia. Konsep dan pemikiran GK Ecopos juga bukan merupakan konsep dan pemikiran yang serta-merta timbul dalam pengukuran kemiskinan. Dalam literatur, konsep ini diungkapkan bermula dari ketidakpercayaan atau kegagalan dari peran modal melalui investasi fisik dan infrastruktur sebagai cara utama dalam pengentasan penduduk dari kemiskinan di satu pihak dan pencapaian tujuan pembangunan di lain pihak. Bank Dunia (1971) melalui World Development Report pada 1970, misalnya, menyatakan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya diatasi dengan penyediaan modal, tetapi juga melalui perbaikan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan

kesehatan tidak hanya penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan penduduk miskin.

Namun, pemikiran terhadap strategi penanggulangan kemiskinan melalui satu dimensi modal/kapital tersebut hanya mampu berusia 10 tahun. Pada 1980, Bank Dunia kembali melakukan perubahan strategi pengentasan masyarakat dari kemiskinan dengan menekankan pentingnya peran perbaikan manajemen ekonomi dan ekonomi pasar dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Latar belakang pentingnya strategi ini didasarkan pada terjadinya perbedaan hasil pembangunan akibat krisis utang dan resesi global di negara Asia Timur, Amerika Latin, Asia Selatan, dan negara Afrika lainnya. Dalam konteks ini, negara-negara di Asia Timur dan Amerika Latin menunjukkan keberhasilan dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan melalui perbaikan manajemen ekonomi dan pengembangan ekonomi pasar, sedangkan negara Asia Selatan dan Afrika relatif lambat dalam mengentaskan penduduknya dari kemiskinan melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan (Bank Dunia, 2000).

Kemudian, bandul strategi pengentasan penduduk dari kemiskinan berubah kembali memasuki awal 1990. Dalam World Development Report pada 1990, Bank Dunia (1991) menekankan pentingnya dua strategi dalam pengentasan penduduk dari kemiskinan. Kedua strategi tersebut adalah strategi promosi pertumbuhan berbasis pemanfaatan tenaga kerja dan investasi infrastruktur serta strategi penyediaan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Namun, pada akhir 1990, terjadi lagi perubahan pemikiran dalam strategi pengentasan penduduk dari kemiskinan. Perubahan ini tidak hanya merupakan akibat banyaknya bukti dan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan tidak optimalnya kedua strategi di atas dalam pengentasan penduduk dari kemiskinan di satu pihak dan adanya perubahan ekonomi berbagai

negara sebagai akibat globalisasi ekonomi. Adapun strategi yang disarankan oleh Bank Dunia untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan tidak lagi didasarkan pada pendekatan ekonomi semata, tetapi lebih dikhususkan pada tiga strategi, yaitu strategi penyediaan kesempatan bagi penduduk miskin (*promoting opportunity strategy*), pemfasilitasan pemberdayaan penduduk miskin (*facilitating empowerment strategy*), dan perluasan keamanan (*enhancing security*). Penjelasan detail dari uraian ini dapat dibaca dalam World Development Report 2000/2001 (Bank Dunia, 2001).

Perubahan strategi pengentasan penduduk dari kemiskinan juga mendapat dukungan dari Amartya Sen (1999) dalam bukunya, *Development as Freedom*. Menurutnya, selain tiga variabel yang menyangkut ketiadaan kesempatan (*lack of opportunity*), rendahnya keberdayaan (*low empowerment*), dan keadaan tidak aman (*insecurity*), faktor kapabilitas (*capabilities*) juga harus dilihat dalam upaya pengentasan penduduk dari kemiskinan. Pentingnya akomodasi keempat variabel tersebut dalam penetapan GK juga disepakati, antara lain, oleh Van Praag, Bernard, & Carbonnel (2006), Clark (2005), dan Wagle (2002).

Van Praag dkk. (2006), misalnya, menegaskan bahwa pengukuran GK yang mengakomodasi keempat variabel Ecopos lebih komprehensif bukan hanya dalam upaya memperoleh data penduduk miskin yang lebih tepercaya, melainkan juga dapat mengungkapkan persoalan dasar yang dihadapi penduduk miskin. Bahkan, Wagle (2002) tidak hanya menekankan pentingnya variabel kapabilitas (*capability*), tetapi juga variabel keterkucilan sosial (*social exclusion*) yang banyak berkaitan dengan masalah sosial, budaya, dan politik. Dengan demikian, GK yang ditetapkan dalam kebijakan dan program pengentasan penduduk dari kemiskinan akan lebih berkualitas, adil, dan sesuai dengan persoalan nyata yang dihadapi penduduk miskin. Itulah sebabnya GK Ecopos direkomendasikan untuk digunakan dalam mengukur jumlah penduduk miskin, khususnya di negara-negara anggota Bank Dunia.

C. APA DIMENSI DAN INDIKATOR GK ECOPOS?

Seperti diuraikan di atas, penetapan GK berbasis Ecopos menjadi cara yang paling komprehensif saat ini. Namun, penetapan hierarki variabel mana dan apa yang harus didahulukan dan/atau dilakukan pertama dari variabel Ecopos untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan tidak mudah. Hal ini terjadi karena tiap variabel Ecopos tersebut tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga mempunyai keterkaitan satu sama lain. Jika misalnya variabel GK hanya mengakomodasi perluasan kesempatan (*opportunity*) berbasis indikator jumlah aset dan ketersediaan akses pasar penduduk miskin, kedua indikator ini juga berimplikasi terhadap variabel keberdayaan (*empowerment*) penduduk miskin sebagai akibat menguatnya posisi tawarnya. Keadaan ini selanjutnya berdampak pada variabel keamanan (*security*) penduduk miskin. Hal ini terjadi karena aset tersebut menjadi pelindung (*security*) kemiskinan.

Demikian pula jika variabel yang diakomodasi dalam penanggulangan kemiskinan difokuskan pada indikator penguatan institusi demokrasi dan memberdayakan penduduk miskin (*empowerment*), misalnya dengan menghapuskan diskriminasi peraturan yang menghambat penduduk miskin, hal ini berarti penduduk miskin dapat memperoleh kesempatan (*opportunity*) untuk berusaha keluar dari perangkap kemiskinan. Karena setiap variabel, dimensi, dan indikator Ecopos mempunyai kaitan satu sama lain, GK Ecopos harus merupakan satu paket.

Dari catatan World Development Report pada 2000 (Bank Dunia, 2001), diungkapkan bahwa setiap variabel Ecopos memiliki banyak dimensi dan indikator. Variabel keberdayaan atau *empowerment*, misalnya, didefinisikan memiliki enam dimensi dan indikator. Adapun definisi yang spesifik menjelaskan apa yang dimaksud dengan pemberdayaan beserta dimensi-dimensinya tidak dijelaskan secara detail dalam sumber rujukan tersebut. Oleh karena itu, definisi operasional variabel pemberdayaan dalam penelitian ini sepenuhnya hanya berdasarkan pada dimensi dan indikatornya.

Tabel 3.1. Variabel, Dimensi, dan Daftar Pertanyaan untuk Indikator Keberdayaan

Variabel	Dimensi	Daftar Pertanyaan
Keberdayaan (<i>Empowerment</i>)	Hak Berpolitik (<i>Democracy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah responden dewasa memiliki hak suara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu? - Apakah responden pernah mendapat halangan saat menyuarkan pendapat?
	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana kualitas dan ketersediaan pelayanan publik (seperti pendidikan dan kesehatan) yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah?
		<ul style="list-style-type: none"> - Apakah responden mampu menjangkau akses-akses penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah?
	Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada anggota rumah tangga responden yang pernah mendapat perlakuan berbeda terkait gender?
	Kesetaraan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah responden pernah mengalami perlakuan yang berbeda/tidak adil terkait dengan hukum?
	Keterbatasan Fisik	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada anggota rumah tangga responden yang memiliki keterbatasan (cacat) fisik?
	Hubungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah responden memiliki kendala dalam hubungan sosial kemasyarakatan? - Apakah responden memiliki relasi (jaringan) yang luas?

Catatan: Daftar pertanyaan dalam kolom ini awalnya berupa indikator yang diungkapkan dalam World Development Report. Untuk keperluan pengumpulan data, setiap indikator diubah menjadi pertanyaan.

Sumber: Bank Dunia (2000)

Variabel pemberdayaan (*empowerment*) didefinisikan dalam enam dimensi dan sembilan indikator. Dimensi tersebut adalah hak berpolitik, pelayanan publik, kesetaraan gender, kesetaraan hukum, keterbatasan fisik, dan hubungan sosial. Setiap dimensi memiliki beragam indikator yang bertujuan mempertajam pengukuran setiap dimensi. Dimensi hak berpolitik, misalnya, memiliki dua indikator untuk mengukurnya, yaitu hak memiliki suara dan hambatan untuk menyuarakan pendapat. Detail dari dimensi dan daftar pertanyaan untuk indikator variabel keberdayaan (*empowerment*) diberikan pada Tabel 3.1.

Berbeda dengan jumlah dimensi dan indikator dari variabel keberdayaan (*empowerment*), variabel kemampuan (*capability*) didefinisikan dalam tiga dimensi, yaitu kecukupan, harga diri, dan kebebasan. Sementara itu, indikator dari dimensi kecukupan didefinisikan khususnya memiliki jumlah indikator yang banyak. Hal ini tidak mengherankan karena dimensi kecukupan tidak hanya menyangkut kecukupan pangan, tetapi juga menyangkut kecukupan nonpangan yang dibutuhkan penduduk. Kecukupan nonpangan yang dimaksudkan antara lain kecukupan pakaian, perumahan, dan kesehatan, ataupun pendidikan. Detail dari semua indikator yang disusun dalam bentuk daftar pertanyaan dari tiap dimensi untuk mendefinisikan variabel kemampuan (*capability*) dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Namun, harus dicatat di sini bahwa tidak semua dimensi dan indikator untuk menjelaskan variabel kemampuan diambil dari indikator yang dikemukakan oleh Sen (1999). Ada beberapa indikator yang diungkapkan dalam dimensi kecukupan, khususnya yang disesuaikan dengan temuan penelitian lapangan sebelumnya (Firdausy, 2015a; 2015b). Sementara itu, semua indikator dalam dimensi harga diri dan kebebasan diambil dari konsep yang ditetapkan oleh Sen (1999). Hal ini terjadi karena indikator-indikator dalam dimensi kecukupan tersebut dikonfirmasi dari temuan penelitian sebelumnya yang penting untuk diakomodasi dalam konteks dimensi kecukupan dari variabel kemampuan.

Tabel 3.2 Variabel, Dimensi, dan Daftar Pertanyaan untuk Indikator Kemampuan (*Capability*)

Variabel	Dimensi	Daftar Pertanyaan
Kemampuan (<i>Capability</i>)	Kecukupan	- Dalam 12 bulan terakhir, apakah responden pernah mengalami kekurangan bahan makanan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan? - Apakah rumah tangga responden bisa mendapatkan air yang bersih untuk air minum? - Apakah anggota rumah tangga memiliki pakaian layak pakai minimal tiga pasang? - Apakah tempat tinggal responden layak huni (luas bangunan/anggota rumah tangga, lantai, atap, dan sebagainya)? - Apakah tanah dan bangunan yang dihuni responden merupakan milik sendiri? - Apakah ada anggota rumah tangga yang tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar? - Apakah ada bayi/balita yang kekurangan gizi? - Apakah ada bayi/balita yang meninggal? - Apakah ada anggota rumah tangga yang terkena penyakit parah? - Apa tingkat pendidikan tertinggi dari anggota rumah tangga dewasa (perolehan ijazah terakhir)?
	Harga Diri	- Apakah responden puas terhadap kondisi saat ini? - Apa motivasi responden untuk mengembangkan diri? - Apakah responden pernah mengalami tindakan pelecehan?

Variabel	Dimensi	Daftar Pertanyaan
	Kebebasan	<p>- Apakah responden memiliki kebebasan dalam menyuarakan pendapat?</p> <p>- Apakah responden memiliki kebebasan untuk memilih dalam berpolitik?</p> <p>- Apakah responden memiliki hak yang sama untuk dipilih dalam berpolitik?</p> <p>- Apakah anggota rumah tangga perempuan pernah mengalami perbedaan perlakuan terkait gender?</p> <p>- Apakah responden pernah mengalami tindakan kejahatan di lingkungan sekitar responden?</p> <p>- Apakah responden memperoleh perlakuan hukum yang sama di masyarakat?</p>

Catatan: Daftar pertanyaan dalam kolom ini awalnya berupa indikator yang diungkapkan dalam Sen (1999). Untuk keperluan pengumpulan data, setiap indikator diubah menjadi pertanyaan.

Sumber: Sen (1999)

Adapun contoh indikator dari dimensi kecukupan dimaksud antara lain menyangkut kecukupan pakaian, rumah layak huni, aset tanah dan bangunan, ketidakmampuan berobat, serta akses terhadap pendidikan.

Hal yang sama ditemukan untuk variabel kesempatan (*opportunity*). Definisi kesempatan juga hanya diungkapkan dalam bentuk dimensi dan indikator. Namun, dalam hal ini, tidak semua indikator dari ketujuh dimensi dalam variabel kesempatan diambil dari World Development Report 2000 (Bank Dunia, 2000). Dalam hal dimensi kesempatan kerja, misalnya, indikator yang berhubungan dengan usia produktif, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan jenis pekerjaan mayoritas penduduk merupakan indikator yang diperoleh dari hasil FGD dengan narasumber dalam penelitian ini (Tabel 3.3).

Begitu pula indikator dalam dimensi akses pelatihan bisnis, akses jalan, dan akses terhadap listrik/energi. Beberapa indikator

dalam tiap dimensi tersebut berbeda dengan indikator dalam tiap dimensi yang diungkapkan dalam literatur. Hal ini mengindikasikan adanya kekhasan indikator dalam dimensi akses pelatihan bisnis, akses jalan, dan akses terhadap listrik/energi yang menjadi temuan penelitian ini. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penggunaan dimensi dan indikator yang diungkapkan dalam rujukan literatur perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan budaya Indonesia. Bahkan, dalam konteks ini, temuan penelitian ini dapat melengkapi dimensi dan indikator yang diungkapkan dalam literatur.

Adapun indikator yang berkaitan dengan dimensi akses pasar, pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih, serta akses terhadap jaringan telekomunikasi yang ditemukan dalam penelitian ini ternyata juga sesuai dengan indikator dari dimensi yang diungkapkan dalam World Development Report 2000 (Bank Dunia, 2000). Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi pentingnya indikator-indikator dari tiap dimensi dalam variabel kesempatan yang diungkapkan Bank Dunia (2001), tetapi juga sekaligus memodifikasi indikator-indikator dari dimensi akses pelatihan bisnis, akses jalan, dan akses terhadap listrik/energi dalam variabel kesempatan. Dengan catatan, semua indikator yang diungkapkan di atas untuk keperluan penelitian ini diubah menjadi daftar pertanyaan.

Tabel 3.3 Variabel, Dimensi, dan Daftar Pertanyaan untuk Indikator Kesempatan

Variabel	Dimensi	Daftar Pertanyaan
Kesempatan (<i>Opportunity</i>)	Akses Kredit	- Apakah rumah tangga ini pernah memperoleh pinjaman kredit dari lembaga keuangan formal? - Untuk keperluan apa kredit tersebut dipergunakan? (kredit konsumtif atau produktif)

Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada anggota rumah tangga di usia produktif (15–64 tahun) yang tidak bekerja? - Apa yang menyebabkan ART tersebut tidak bekerja? - Bagaimana ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah responden? - Apa pekerjaan mayoritas penduduk di lokasi responden?
Akses Jaringan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah rumah tangga ini memiliki jaringan internet? - Untuk keperluan apa biasanya jaringan internet dipergunakan? - Apakah tempat tinggal responden sudah terhubung dengan jaringan telepon?
Akses Pelatihan Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah rumah tangga ini pernah memperoleh pelatihan bisnis? - Bagaimana jarak dari tempat tinggal menuju pelatihan bisnis tersebut?
Akses Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah tempat tinggal responden sudah terhubung dengan pusat bisnis, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya? - Bagaimana jarak dari tempat tinggal responden menuju pusat bisnis, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya?
	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana kondisi jalan di sekitar tempat tinggal responden? - Apakah ada fasilitas angkutan/ transportasi umum yang menghubungkan antara tempat tinggal responden dengan pusat bisnis, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya?
Akses Listrik/Energi	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah tempat tinggal responden memiliki kendala dalam menjangkau akses kelistrikan? - Apakah tempat tinggal responden jauh dari akses pembelian bahan bakar, seperti BBM, gas, dan sebagainya?

Akses Pasar, Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi, dan Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah di sekitar tempat tinggal responden terdapat pasar untuk memasarkan hasil produksi responden? - Apakah responden mampu memanfaatkan pasar untuk memasarkan hasil produksi? - Apakah di sekitar tempat tinggal responden terdapat sekolah atau lembaga pendidikan lainnya? - Apakah responden mampu bersekolah? - Apakah di sekitar tempat tinggal responden terdapat puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan lainnya? - Apakah responden mampu berobat di rumah sakit tersebut? - Apakah di sekitar tempat tinggal responden terdapat sistem sanitasi dan air bersih yang baik? - Apakah responden mampu memanfaatkan fasilitas sanitasi dan air bersih yang ada?
--	--

Catatan: Daftar pertanyaan dalam kolom ini awalnya berupa indikator yang diungkapkan dalam World Development Report 2000. Untuk keperluan pengumpulan data, setiap indikator diubah menjadi pertanyaan.

Sumber: Bank Dunia (2000)

Untuk dimensi dan indikator dalam variabel keamanan (*security*), semua sampel responden dan FGD di lokasi penelitian nyaris tidak secara eksplisit mengungkapkan pentingnya variabel, dimensi, dan indikator keamanan dalam menetapkan GK Ecopos. Variabel keamanan (*security*) didefinisikan meliputi empat dimensi dan delapan indikator. Dimensi dan indikator yang diubah dalam bentuk daftar pertanyaan dipersepsikan tidak mutlak penting dalam penetapan GK Ecopos, tetapi lebih bersifat perlu (*necessary conditions*). Barangkali temuan ini tidak mengherankan karena responden beranggapan variabel keamanan beserta dimensi dan indikator yang ditentukan dalam literatur merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah yang diperuntukkan bagi setiap

warga negara. Detail dimensi dan indikator yang diubah dalam bentuk pertanyaan dari variabel keamanan yang ditetapkan dalam literatur dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel, dimensi, dan indikator Ecopos yang perlu diakomodasi dalam menetapkan GK Ecopos tidak dapat digeneralisasi atau seluruhnya sama dengan yang diungkapkan dalam literatur, tetapi bervariasi sesuai dengan karakteristik lokasi kemiskinan berada. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa variabel keamanan (*security*) tidak atau belum mutlak perlu digunakan sebagai variabel yang harus ditetapkan dalam GK Ecopos untuk mengukur proporsi dan jumlah penduduk miskin. Variabel keamanan dipersepsikan sebagai variabel yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara Indonesia. Untuk variabel keberdayaan (*empowerment*), kemampuan (*capability*), dan kesempatan (*opportunity*), ditemukan mutlak perlu diakomodasi dalam penetapan garis kemiskinan Ecopos. Lantas, bagaimana hierarki dan *ranking* (peringkat) dari variabel, dimensi, dan indikator dalam menetapkan GK Ecopos?

D. HIERARKI SERTA RANKING VARIABEL, DIMENSI, DAN INDIKATOR GK ECOPOS

Penetapan hierarki dan *ranking* dari variabel, dimensi dan indikator dalam GK Ecopos penting diungkapkan di sini. Paling tidak dimaksudkan untuk tiga tujuan. Pertama, untuk menajamkan dan/atau memilah variabel, dimensi, dan indikator yang harus diperhatikan dan/atau merupakan *necessary condition* dalam penetapan GK Ecopos. Kedua, untuk mengonfirmasi hasil temuan penelitian ini dengan temuan empiris yang diungkapkan dalam literatur terdahulu menyangkut tambahan atau pengurangan variabel, dimensi, dan indikator dalam penetapan GK Ecopos khas Indonesia. Ketiga, untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan program pengentasan penduduk dari kemiskinan secara lebih tepat.

Tabel 3.4. Variabel, Dimensi, dan Daftar Pertanyaan untuk Indikator Keamanan

Variabel	Dimensi	Daftar Pertanyaan
Keamanan (Security)	Kerentanan terhadap Krisis Keuangan	- Apakah responden memiliki pekerjaan tetap?
		- Apakah responden memiliki penghasilan tetap setiap bulannya?
		- Apakah responden terkena dampak adanya krisis keuangan pada 1998/2008?
	Kerentanan terhadap Bencana	- Apakah tempat tinggal responden berada dalam lokasi yang rawan terjadi bencana?
	Kerentanan terhadap Konflik Sosial	- Apakah di sekitar tempat tinggal responden rentan terjadi konflik sosial?
- Apakah responden pernah mengalami tindak kejahatan di sekitar tempat tinggal responden?		
Kerentanan terhadap Penyakit	- Apakah ada anggota rumah tangga responden yang terkena penyakit menular atau penyakit berat?	
		- Apakah lingkungan sekitar rumah responden rentan terhadap penyakit?

Catatan: Daftar pertanyaan dalam kolom ini awalnya berupa indikator yang diungkapkan dalam World Development Report (2000). Untuk keperluan pengumpulan data, setiap indikator diubah menjadi pertanyaan.

Sumber: Bank Dunia, 2000.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa keempat variabel Ecopos dipersepsikan tidak dapat dibuat *ranking* atau hierarki secara tegas dalam penetapan GK Ecopos. Hal ini mengindikasikan bahwa keempat variabel secara umum memiliki tingkat kepentingan yang sama (*indifference*) untuk diakomodasikan dalam GK Ecopos. Temuan ini juga mengonfirmasi pernyataan Bank Dunia (2000) dalam World Development Report 2000 sebagai berikut.

"There is no hierarchy of importance. The elements are deeply complementary. Each part of the strategy affects underlying causes of poverty addressed by the others."

Namun, berbeda dengan catatan World Development Report 2000, dari keempat konsep Ecopos tersebut, variabel *security* relatif tidak dianggap sebagai variabel yang mutlak harus dimasukkan ke penetapan GK Ecopos, tetapi sebagai kondisi yang diperlukan (*necessary condition*) atau dapat disebut juga sebagai *complementary factors* dalam pengentasan penduduk dari kemiskinan. Hal ini tidak mengherankan karena dimensi dan indikator dari variabel keamanan tersebut tidak hanya merupakan kebutuhan penduduk miskin, tetapi juga penduduk non-miskin. Dengankata lain, dimensi dan indikator dari variabel keamanan ini merupakan dimensi dan indikator yang bersifat *community* atau *common right* atau juga *public right* dan bukan terkait dengan kebutuhan dan hak orang per orang (*individual right*) sehingga tidak mutlak harus diakomodasi dalam penetapan GK Ecopos.

Berbeda dengan variabel, dimensi, dan indikator keberdayaan (*empowerment*), temuan penelitian ini tidak hanya mengonfirmasikan pentingnya variabel ini, melainkan juga semua dimensi dan indikator dari variabel keberdayaan yang ditetapkan literatur (Bank Dunia, 2000) dalam merumuskan GK Ecopos. Keseluruhan dimensi dan indikator dari variabel keberdayaan yang dimaksudkan adalah keberdayaan berpolitik dan berpendapat, keberdayaan memanfaatkan pelayanan publik, keberdayaan kesetaraan gender, keberdayaan kesetaraan hukum, keberdayaan fisik, serta keberdayaan kehidupan sosial masyarakat (Tabel 3.1).

Selain enam dimensi tersebut, temuan penelitian ini menambahkan tiga dimensi keberdayaan lain yang dipersepsikan penting dalam GK Ecopos yang diungkapkan dari hasil FGD. Ketiga dimensi keberdayaan tambahan tersebut adalah keberdayaan memperoleh lapangan kerja, keberdayaan melakukan dan memperoleh kegiatan usaha, serta keberdayaan memenuhi kebutuhan non-

makanan. Namun, dari sembilan dimensi variabel keberdayaan di atas, ternyata empat dimensi dalam variabel keberdayaan (*empowerment*) tersebut diposisikan wajib oleh peserta FGD untuk dimasukkan ke penetapan GK Ecopos. Keempat dimensi keberdayaan tersebut adalah dimensi keberdayaan memenuhi kebutuhan pangan, keberdayaan melakukan dan memperoleh kegiatan usaha, keberdayaan memperoleh lapangan kerja, serta keberdayaan memanfaatkan fasilitas publik. Sementara itu, lima dimensi keberdayaan berpolitik, kesetaraan gender, kesetaraan hukum, keterbatasan fisik, dan keberdayaan melakukan kehidupan sosial tidak diposisikan sangat diperlukan oleh peserta FGD bagi penetapan GK Ecopos. Alasannya, kelima dimensi ini relatif diperlukan tidak saja penduduk miskin tetapi juga oleh penduduk tidak miskin agar tidak mengalami kehidupan miskin.

Untuk variabel, dimensi, dan indikator kemampuan (*capability*), variabel kemampuan perlu dimasukkan ke GK Ecopos. Namun, dalam hal dimensi dan indikatornya, dimensi yang dipersepsikan penting untuk GK Ecopos adalah dimensi kecukupan. Sementara itu, dimensi harga diri dan kebebasan tidak perlu dimasukkan dalam GK Ecopos (Tabel 3.2). Penyebab lainnya adalah dimensi harga diri dan kebebasan merupakan dimensi yang bukan merupakan *individual right*, melainkan lebih merupakan *community right* atau *common right* seperti halnya dimensi dan indikator dari variabel keamanan yang diuraikan di atas. Dengan kata lain, harga diri dan kebebasan merupakan dimensi yang tidak spesifik hanya dibutuhkan bagi penduduk miskin.

Untuk dimensi kecukupan, paling tidak terdapat 11 indikator yang diungkapkan dalam FGD yang perlu dimasukkan ke penetapan GK Ecopos. Ke-11 indikator itu terkait dengan kemampuan memenuhi kecukupan pangan, air bersih, pakaian layak, tempat tinggal, makanan bergizi, kesehatan, pendidikan dasar, pekerjaan/nafkah untuk rumah tangga, pemilikan aset, kecukupan pendapatan/pengeluaran, dan pemenuhan kebutuhan sosial kemasyarakatan (Tabel 3.2).

Namun, jika 11 indikator dari dimensi kecukupan dalam variabel kemampuan di atas harus diperingkat berdasarkan pada tingkat kepentingan, hasil penelitian ini tidak konklusif. Artinya, tidak ada indikator yang harus lebih didahulukan (*indifference*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan ke-11 indikator dalam dimensi kecukupan dinilai memiliki kedudukan yang mutlak sama. Implikasi temuan ini adalah dimensi kecukupan dengan sebelas indikator yang diberikan pada Tabel 3.2 mutlak diperlukan dalam penetapan GK Ecosos sesuai dengan yang diungkapkan oleh sampel responden dan FGD.

Selanjutnya, untuk variabel kesempatan (*opportunity*), penelitian ini menegaskan bahwa variabel ini dengan tujuh dimensi dan 25 indikator perlu diperhatikan dalam menetapkan GK Ecosos (Tabel 3.3). Tujuh dimensi dari variabel kesempatan yang mutlak diperlukan dalam menetapkan GK Ecosos adalah akses memperoleh kredit; akses kesempatan kerja; akses jaringan telekomunikasi; akses pelatihan bisnis; akses jalan; akses listrik dan energi; serta akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air bersih.

Namun, dalam hal *ranking* kepentingan, dari 25 indikator untuk semua dimensi variabel kesempatan, ternyata indikator pelayanan hidup bersih dan indikator kesempatan mendapatkan informasi dan komunikasi diposisikan diberi *ranking* kepentingan yang rendah oleh responden ataupun peserta FGD penelitian ini dalam penetapan GK Ecosos. Alasannya, kedua indikator ini lebih terkait dengan latar belakang sosial budaya (dalam hal ini menyangkut pelayanan hidup bersih) dan kenyataan telah meluasnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini.

E. KESIMPULAN

Penetapan GK Ecosos perlu memasukkan variabel keberdayaan (*empowerment*), kemampuan (*capability*), dan kesempatan (*opportunity*). Sementara variabel keamanan (*security*) dengan segala dimensi dan indikatornya dipersepsikan hanya sebagai bagian penting dari GK Ecosos, dan bukan bagian mutlak yang perlu di-

akomodasi dalam penetapan GK Ecopos. Hal ini mengindikasikan bahwa penetapan GK perlu mengakomodasi variabel non-ekonomi, khususnya variabel keberdayaan, kemampuan, dan kesempatan. Sementara itu, variabel keamanan tidak secara eksplisit diungkapkan menjadi variabel penting dalam penetapan GK. Justifikasi tidak dipentingkannya variabel keamanan terutama karena variabel ini dianggap tidak secara linear terkait dengan kemiskinan seseorang. Dengan kata lain, keamanan merupakan *public goods* dan bukan *private goods*.

Dimensi dan indikator GK Ecopos yang diungkapkan dalam literatur tidak dapat digeneralisasi dalam penerapannya di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa untuk variabel keberdayaan, terdapat lima dimensi yang tidak dapat diterapkan dalam penetapan GK Ecopos. Kelima dimensi dari variabel pemberdayaan itu adalah dimensi pemberdayaan berpolitik, kesetaraan gender, kesetaraan hukum, keterbatasan fisik, dan keberdayaan melakukan kehidupan sosial. Sementara untuk variabel kemampuan (*capability*), dimensi harga diri dan kebebasan tidak perlu dimasukkan ke GK Ecopos. Dimensi kecukupan dalam variabel kemampuan merupakan satu-satunya dimensi yang diperlukan dalam penetapan GK Ecopos. Temuan yang sama didapatkan untuk variabel kesempatan (*opportunity*), dengan indikator memperoleh kesempatan mendapatkan informasi dan komunikasi diberi *ranking* kepentingan yang rendah.

Oleh karena itu, implikasi kebijakan penetapan GK Ecopos berdasarkan pada studi ini adalah sebagai berikut. Pertama, variabel, dimensi, dan indikator untuk menetapkan GK Ecopos di Indonesia tidak sepenuhnya sama dengan yang ditemukan dalam literatur. Kedua, GK resmi BPS yang hanya menggunakan variabel pengeluaran dengan dua dimensi makanan dan nonmakanan perlu dilengkapi dengan masukan variabel, dimensi, dan indikator Ecopos yang dipersepsikan penduduk miskin dan tidak miskin dalam penelitian ini. Ketiga, perbaikan terhadap GK resmi yang berpedoman pada GK Ecopos yang dipersepsikan dalam peneli-

tian diyakini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas SDM, daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional kini dan mendatang. Hal ini terjadi karena dengan dipenuhinya keempat variabel Eco-pos beserta dimensi dan indikatornya, penduduk miskin besar kemungkinan memiliki peluang yang luas untuk meningkatkan kualitas kehidupannya yang kemudian dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S., & Santos, M. E. (2011). *Acute multidimensional poverty: A new index for developing countries* (OPHI Working Paper, 38, hlm. 22 – 32).
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kemiskinan di Indonesia, 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Dunia. (1972). *World development report 1970*. Washington D.C.: World Bank.
- Bank Dunia. (1991). *World development report 1990*. Washington D.C.: World Bank.
- Bank Dunia. (2000). *World development report 2000*. Washington D.C.: World Bank.
- Bank Dunia. (2001). *World Development Report 2001: Attacking Poverty*. Washington DC : World Bank.
- Budiantoro. (2015). *Penghitungan indeks kemiskinan multidimensi Indonesia: 2012-2014*. Jakarta: PRAKARSA.
- Clark, David. (2005). *The capability approach: Its development, critiques and recent advances*. Manila: ADB.
- Firdausy, C. M. (2015). *Can multidimensional poverty line be used as an alternative of Indonesia's poverty line?*. Manila: Asian Development Think Tank Forum 2.
- Firdausy, C. M. (2015b). *Konsep dan garis kemiskinan di Indonesia*. (Laporan Penelitian). Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI.
- Ningrum, D.R., Taariq, R. M., Sagala, M., & Aidha, C. N. (2019). *Indeks kemiskinan multidimensi: Memotret wajah-wajah kemiskinan di Indonesia*. (PRAKARSA Policy Brief, No. 13, April 2019). 1 – 4.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Van Praag, Benard, & Carbonnel, A. F. (2006). *A multi-dimensional approach to subjective poverty*. Brazilia: UNDP.
- Wagle, U. (2002). Rethinking poverty: definition and measurement. *International Social Science Journal*. 54(171), 155 – 165.



BAB IX GK DAN KEMISKINAN ECOPOS: CATATAN AKHIR

Carunia Mulya Firdausy

A. KELEMAHAN GARIS KEMISKINAN BPS

Garis kemiskinan (GK) absolut BPS, yang menggunakan ukuran satu dimensi (unidimensional) berdasarkan pengeluaran penduduk per kapita per bulan, perlu dilengkapi dengan pengukuran kemiskinan absolut berbasis multidimensi atau dalam buku ini disebut Ecopos (*empowerment, capability, opportunity, dan security*). Alasannya, perhitungan jumlah penduduk miskin dengan hanya menggunakan GK absolut BPS yang bersifat unidimensional tidak mampu menggambarkan kualitas kehidupan penduduk miskin. GK resmi BPS hanya berdasarkan pada kebutuhan kalori sehingga menyebabkan GK yang digunakan menjadi rendah karena kalori dapat dipenuhi dengan komponen makanan tinggi kalori yang cenderung berharga rendah. Juga karena kebutuhan nutrisi dapat mencakup zat nutrisi lain, seperti protein yang belum diperhitungkan dalam GK tersebut.

Selain itu, keabsahan pemilihan 52 jenis komoditas bukan makanan masih dapat dipertanyakan karena penentuan ini bisa bersifat "*arbitrary*" dan penentuan ini menentukan rendah atau tingginya GK. Demikian pula, dengan diturunkannya secara terpisah GK perdesaan dan GK perkotaan, bisa saja terjadinya kedua GK tersebut tidak terbanding secara sempurna dalam hal perbedaan tingkat kehidupan (*standard of living*) antara perdesaan dan perkotaan.

Dengan catatan kelemahan ini, jumlah penduduk yang terdata sebagai penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah GK pendapatan/pengeluaran tersebut saja. Sementara penduduk yang miskin di luar ukuran pendapatan/pengeluaran sebagai akibat, antara lain, ketidakmampuan menjalankan fungsinya dalam masyarakat, baik karena rendahnya pendidikan, ketidakmampuan berobat ke dokter atau institusi kesehatan, tidak layaknya pekerjaan yang dilakukan, rendahnya kepercayaan diri, tidak adanya perasaan aman, lingkungan yang rentan bencana, minimnya aset dan akses pemilikan tanah, rendahnya akses kredit usaha, rendahnya kemampuan berinovasi, maupun rendahnya kebebasan politik (misalnya berbicara) dan lain-lain, tidak terungkap dalam data penduduk miskin berbasis GK resmi BPS berdasarkan pada pendapatan/pengeluaran tersebut (Asra, 2011).

Bab ini berisi catatan akhir dari seluruh pembahasan dari bab-bab sebelumnya untuk mempertajam kembali konsep GK dan kemiskinan Ecopos. Catatan akhir dalam bab ini diawali dengan apa yang dimaksud GK Ecopos dengan segala dimensi dan indikator yang diungkapkan dalam literatur. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan temuan hasil penelitian lapangan yang terkait dengan dimensi dan indikator dari GK Ecopos dan pemahaman kemiskinan Ecopos oleh pekerja di sektor informal, nasabah KUR, petani berlahan marginal, petani penerima SIDA, dan penduduk di kawasan rentan perubahan iklim di bagian ketiga. Adapun bagian keempat mengungkapkan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan Ecopos. Bagian kelima merupakan kesimpulan bab ini.

B. DIMENSI GK ECOPOS VERSI LITERATUR

Seperti dijelaskan terdahulu bahwa pengukuran kemiskinan absolut dengan segala konsep dan definisinya mengalami perkembangan yang relatif pesat belakangan ini. Dari perkembangan tersebut, pengukuran kemiskinan absolut secara objektif, baik secara statik maupun dinamik, lebih dominan belakangan ini. Hal ini

terjadi karena pengukuran kemiskinan absolut statik dan dinamik dapat dilakukan dengan satu dimensi (*unidimensional*) dan lebih dari satu dimensi (*multidimensional*). Pengukuran satu dimensi umumnya mencakup pengeluaran atau pendapatan, sedangkan pengukuran multidimensi mencakup berbagai kebutuhan kehidupan yang lebih luas.

Namun, antara pengukuran statik dan dinamik tersebut, pengukuran kemiskinan absolut statik-dinamik dengan lebih dari satu dimensi makin banyak disarankan dalam literatur untuk digunakan dalam menghitung jumlah penduduk miskin. Pengukuran multidimensi ini biasanya mencakup aspek kesejahteraan yang lebih luas, tidak hanya kesejahteraan ekonomi, yang biasanya diwakili dengan "uang" (pengeluaran atau pendapatan) (*monetary poverty indicator*), tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial kemasyarakatan (biasa disebut sebagai *non-income/monetary poverty indicator*). Alkire dalam Asra (2014) menyatakan bahwa secara ringkas, keuntungan utama dari pendekatan multidimensi, atau dalam hal ini disebut Ecopos, dalam mengukur kemiskinan adalah:

‘... dimungkinkannya diperoleh gambaran sebaran kemiskinan berdasarkan kombinasi dari dimensi yang ada, misal dimensi kesehatan dan pendidikan sehingga bisa terlihat kelompok yang perlu dibantu berdasarkan dua dimensi secara bersamaan, yang bisa berbeda dengan bila digunakan hanya secara satu dimensi, misalnya hanya kesehatan saja, atau hanya pendidikan saja.’ (Asra, 2014, 95).

Dalam catatan World Development Report tahun 2000 (Bank Dunia, 2001), diungkapkan bahwa setiap variabel Ecopos memiliki banyak dimensi dan indikator. Untuk variabel pemberdayaan/keberdayaan atau *empowerment*, misalnya, terdapat enam dimensi. Dimensi tersebut ialah hak berpolitik, pelayanan publik, kesetaraan gender, kesetaraan hukum, keterbatasan fisik, dan hubungan sosial. Setiap dimensi memiliki beragam indikator

yang ditujukan untuk mempertajam pengukuran setiap dimensi. Dimensi hak berpolitik, misalnya, memiliki dua indikator untuk mengukurnya, yaitu hak memiliki suara dan hambatan untuk menyuarkan pendapat.

Untuk variabel kemampuan (*capability*), Sen (1999) menekankan pentingnya tiga dimensi, yaitu kecukupan, harga diri, dan kebebasan. Adapun untuk indikator dari dimensi kecukupan Sen (1999) menetapkan jumlah indikator yang lebih banyak dibandingkan indikator-indikator dari dimensi harga diri dan kebebasan. Hal ini tidak mengherankan karena dimensi kecukupan tidak hanya menyangkut kecukupan pangan, tetapi juga menyangkut kecukupan nonpangan yang dibutuhkan penduduk. Kecukupan nonpangan yang dimaksudkan, antara lain, adalah kecukupan pakaian, perumahan dan kesehatan, serta pendidikan.

Untuk variabel kesempatan (*opportunity*), World Development Report tahun 2000 mencatat tujuh dimensi, yaitu dimensi akses kredit; kesempatan kerja; akses jaringan komunikasi; akses pelatihan bisnis; akses jalan; akses listrik/energi; serta akses pasar, pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Selanjutnya, untuk variabel keamanan (*security*) terdapat hanya empat dimensi, yaitu dimensi kerentanan terhadap krisis, kerentanan terhadap bencana, konflik sosial, dan penyakit.

C. DIMENSI GK ECOPOS: TEMUAN PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa keempat variabel Eco-pos yang secara empiris direkomendasikan dalam literatur untuk digunakan dalam penetapan GK ternyata tidak dapat dibuat pemeringkatan atau hierarki secara tegas dalam penetapan GK Eco-pos. Ini mengindikasikan bahwa keempat variabel secara umum memiliki tingkat kepentingan yang sama (*indifference*) untuk diakomodasikan dalam GK Eco-pos. Temuan ini juga mengonfirmasi pernyataan Bank Dunia dalam World Development Report 2000.

Temuan penting lain adalah dari keempat variabel Ecopos tersebut, variabel *security* relatif tidak dianggap sebagai variabel yang mutlak (*a must*) harus dimasukkan ke penetapan GK Ecopos, tetapi sebagai kondisi yang diperlukan (*necessary condition*) atau dapat disebut juga sebagai *complementary factors* dalam pengentasan penduduk dari kemiskinan. Hal ini tidak mengherankan karena dimensi dan indikator dari variabel keamanan tersebut tidak hanya merupakan kebutuhan penduduk miskin, tetapi juga penduduk nonmiskin. Dengan kata lain, dimensi dan indikator dari variabel keamanan ini merupakan dimensi dan indikator yang bersifat *community* atau *common right* atau juga *public right* dan bukan terkait dengan kebutuhan dan hak orang per orang (*individual right*) sehingga tidak mutlak harus diakomodasi dalam penetapan GK Ecopos.

Untuk variabel pemberdayaan, ditemukan sembilan dimensi yang dipersepsikan perlu dimasukkan ke penetapan GK Ecopos. Dimensi dari variabel pemberdayaan yang dimaksud meliputi dimensi keberdayaan berpolitik dan berpendapat, keberdayaan memanfaatkan pelayanan publik, keberdayaan kesetaraan gender, keberdayaan kesetaraan hukum, keberdayaan fisik, keberdayaan kehidupan sosial, keberdayaan memperoleh lapangan kerja, keberdayaan melakukan, serta memperoleh kegiatan usaha dan keberdayaan memenuhi kebutuhan pangan. Namun, dari sembilan dimensi variabel keberdayaan tersebut, ternyata hanya empat dimensi yang diposisikan wajib dimasukkan ke penetapan GK Ecopos. Keempat dimensi keberdayaan dimaksud adalah dimensi keberdayaan memenuhi kebutuhan pangan, keberdayaan melakukan dan memperoleh kegiatan usaha, keberdayaan memperoleh lapangan kerja, serta keberdayaan memanfaatkan fasilitas publik. Sementara 5 dimensi sisanya tidak diposisikan wajib dimasukkan ke penetapan GK Ecopos. Alasannya, kelima dimensi ini relatif diperlukan tidak hanya oleh penduduk miskin, tetapi juga mereka yang tidak miskin.

Untuk variabel, dimensi dan indikator kemampuan (*capability*), variabel kemampuan perlu dimasukkan ke GK Ecosos. Namun, dalam hal dimensi dan indikatornya, dimensi yang dipersepsikan penting untuk GK Ecosos ialah dimensi kecukupan. Sementara dimensi harga diri dan kebebasan tidak perlu dimasukkan dalam GK Ecosos. Penyebabnya juga adalah dimensi harga diri dan kebebasan merupakan dimensi yang bukan merupakan *individual right*, tetapi lebih merupakan *community right* atau *common right* seperti halnya dimensi dan indikator dari variabel keamanan yang diuraikan di atas. Dengan kata lain, harga diri dan kebebasan merupakan dimensi yang tidak spesifik hanya dibutuhkan bagi penduduk miskin.

Selanjutnya, untuk dimensi kecukupan, paling tidak terdapat 11 indikator yang perlu dimasukkan ke penetapan GK Ecosos. Ke-11 indikator tersebut terkait dengan kemampuan memenuhi kecukupan pangan, air bersih, pakaian layak, tempat tinggal, makanan bergizi, kesehatan, pendidikan dasar, pekerjaan/nafkah untuk rumah tangga, pemilikan aset, kecukupan pendapatan/ pengeluaran, dan pemenuhan kebutuhan sosial kemasyarakatan. Namun, jika ke-11 indikator dari dimensi kecukupan dalam variabel kemampuan di atas harus di-*ranking* berdasarkan pada tingkat kepentingan, hasil penelitian ini tidak konklusif. Artinya, Tidak ada indikator yang harus lebih didahulukan (*indifference*). Ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan ke-11 indikator dalam dimensi kecukupan dinilai memiliki kedudukan yang mutlak sama.

Untuk variabel kesempatan (*opportunity*), penelitian ini menegaskan tujuh dimensi dan 25 indikator yang perlu diperhatikan dalam menetapkan GK Ecosos. Tujuh dimensi tersebut adalah akses memperoleh kredit; akses kesempatan kerja; akses jaringan telekomunikasi; akses pelatihan bisnis; akses jalan; akses listrik dan energi; serta akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Namun, dalam hal *ranking* kepentingan, dari 25 indikator untuk semua dimensi variabel kesempatan, ternyata indikator pelayanan hidup bersih dan indikator kesempatan mendapatkan

informasi dan komunikasi diposisikan diberi *ranking* kepentingan yang rendah. Alasannya, kedua indikator ini lebih terkait dengan latar belakang sosial budaya (dalam hal ini menyangkut pelayanan hidup bersih) serta kenyataan telah meluasnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini.

Selain temuan di atas, ditemukan bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang dekat dengan individu yang tidak memiliki pekerjaan layak, tidak memiliki akses terhadap kredit usaha rakyat, tidak memiliki hak atas tanah dan akses sumber daya agraria, ataupun tidak memiliki kemampuan inovasi, dan individu yang hidup di lingkungan yang rentan dengan perubahan iklim. Bagi penduduk yang bekerja di sektor informal, misalnya, pengurangan kemiskinan Ecopos dapat di atasi dengan upaya mempertahankan penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas, menjamin pengembangan pekerjaan yang produktif, peningkatan potensi ekonomi informal, peningkatan perlindungan, ketenangan dalam berusaha, hingga penguatan organisasi pekerja/kelompok tani agar makin berdaya.

Sementara itu, bagi nasabah KUR, penanggulangan kemiskinan Ecopos dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan yang bukan hanya kemudahan akses permodalan, tetapi juga pemberdayaan dalam metode produksi, penumbuhan inovasi, adopsi teknologi, pemasaran dan manajemen usaha, serta pihak yang bertanggung jawab dalam memberdayakan nasabah KUR. Upaya pemberdayaan yang mencakup semua komponen di atas merupakan ungkapan yang dinyatakan oleh penerima KUR dalam penelitian ini.

Hal yang sama diungkapkan oleh petani bahwa pemilikan terhadap tanah dan akses tanah menjadi kunci dalam penanggulangan kemiskinan penduduk miskin di perdesaan. Hal ini terjadi karena aset dan akses atas tanah mampu memberdayakan penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Namun, pemberdayaan dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh akses atas tanah harus pula dilengkapi dengan variabel kemampuan

penduduk miskin untuk mengelolanya dan keamanan dalam pengelolaan aset atas tanah tersebut.

Namun, sebagai sebuah kebijakan yang utuh, perhatian terhadap keempat variabel Ecopos dalam pengentasan penduduk dari kemiskinan perlu dilengkapi dengan pemahaman terhadap relasi dalam penguasaan lahan atau sumber daya agraria, relasi dalam tata produksi sumber agraria dan relasi dalam pemanfaatan tanah. Jika pemahaman terhadap relasi-relasi yang berkaitan dengan keempat variabel Ecopos tidak diperhatikan, upaya penanggulangan kemiskinan dalam konteks agraria ini tidak dapat berjalan optimal.

Temuan yang hampir sama diungkapkan oleh petani penerima SIDA dan penduduk di kawasan perubahan iklim. Petani penerima SIDA menyatakan bahwa variabel Ecopos dengan segala dimensi dan indikator perlu diperhatikan dalam pengembangan dan pelaksanaan SIDA. Dengan adanya perhatian terhadap semua variabel Ecopos tersebut, kebijakan pengembangan SIDA dapat dijadikan alat/sarana untuk membantu percepatan penanggulangan kemiskinan dengan mendekati petani miskin terhadap inovasi yang membantu meningkatkan produksi serta membuka akses terhadap berbagai informasi inovasi ataupun inovasi yang dapat meningkatkan produksi dan produktivitas petani sekaligus pasar bagi hasil produksinya. Peran SIDA dalam membantu percepatan penanggulangan kemiskinan akan efektif bila didukung oleh sarana dan prasarana yang sesuai, kelembagaan, dan dukungan pemerintah lokal. Sementara bagi penduduk yang tinggal di kawasan rentan perubahan iklim, pengentasan masyarakat dari kemiskinan Ecopos perlu memperhatikan, antara lain, pemberdayaan meningkatkan pengetahuan lokal tentang perubahan variabel iklim, pemberdayaan mengembangkan kegiatan produksi, dan pemberdayaan menyediakan bahan pangan.

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ECOPOS

Penggunaan GK dan pemahaman kemiskinan Ecopos dapat lebih diandalkan sebagai strategi dan kebijakan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Jika tidak, masalah kemiskinan akan terus menjadi masalah yang tidak pernah akan habis-habisnya merongrong semua aspek pembangunan nasional. Dari beberapa strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan, paling tidak dua strategi dan kebijakan berikut ini perlu diperhatikan.

Pertama, dengan merumuskan kebijakan dan program yang diarahkan langsung pada perbaikan dimensi dan indikator dari semua variabel Ecopos yang ditemukan dalam studi ini. Kedua, membentuk badan atau bahkan kementerian tersendiri yang tugas utamanya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Dalam menjalankan strategi yang pertama perhatian tidak hanya pada perumusan kebijakan dan program menyangkut seluruh variabel, dimensi, dan indikator Ecopos, tetapi juga harus memperhatikan aspek yang terkait di dalamnya. Aspek tersebut meliputi aspek *affordability*, *accessibility*, *availability*, dan *awareness*, serta *location specific* dari individu yang menjadi target penanggulangan kemiskinan. Artinya, strategi, kebijakan, dan program penanggulangan kemiskinan Ecopos yang disusun tidak boleh hanya sebatas pada pembentukan kebijakan dan program, tetapi juga harus menekankan aspek-aspek 4A plus L (*affordability*, *accessibility*, *availability*, dan *awareness*, serta *location specific*).

Selain itu, penetapan kebijakan dan program kemiskinan Ecopos harus menjadi satu kesatuan (*integration*). Artinya, kebijakan dan program kemiskinan Ecopos tidak boleh bersifat parsial ataupun hierarkis. Hal ini terjadi karena tiap variabel dalam Ecopos tersebut tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga mempunyai keterkaitan satu sama lain. Kebijakan dan program yang hanya memperhatikan variabel kesempatan (*opportunity*), misal-

nya, tidak akan berhasil jika tidak ada kebijakan dan program keberdayaan (*empowerment*) dan/atau kebijakan dan program keamanan (*security*) penduduk miskin.

Selain aspek satu kesatuan (*integration*), aspek sustainabilitas mutlak perlu diperhatikan karena upaya penanggulangan kemiskinan merupakan suatu proses panjang yang berkesinambungan. Dengan demikian, "gonta-ganti" kepemimpinan negara dan pemerintahan tidak layak untuk selalu harus diikuti dengan "gonta-ganti" kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Perubahan kebijakan dan program hanya dapat dilakukan hanya jika perubahan tersebut memang sangat diperlukan.

Dalam konteks pembentukan badan atau kementerian tersendiri dalam penanganan kemiskinan, terdapat dua argumentasi pentingnya strategi ini. Pertama, luas dan kompleksnya persoalan kemiskinan (*vicious circle*). Kedua, pengalaman yang selama ini menunjukkan betapa sulitnya koordinasi dari berbagai kementerian dan institusi yang menangani upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan sangat menyesatkan jika ditangani oleh berbagai institusi. Apalagi kehadiran institusi tersebut kental dengan *interest* masing-masing.

E. KESIMPULAN

GK resmi BPS dalam menghitung penduduk miskin perlu diperluas mencakup variabel Ecopos karena GK Ecopos merupakan GK yang bersifat lebih mampu memotret kebutuhan individu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Artinya, dengan menggunakan GK Ecopos, program dan kebijakan anti-kemiskinan yang disusun tidak dibatasi pada upaya memerangi ketidakmampuan individu dalam memenuhi hanya satu kebutuhan dasar semata, tetapi juga mampu memenuhi berbagai kebutuhan lain. Bagi nasabah KUR, misalnya, penanganan kemiskinan Ecopos dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan yang tidak hanya sekadar kemudahan akses permodalan, tetapi juga pemberdayaan dalam metode produksi, penumbuhan inovasi, adopsi teknologi,

pemasaran dan manajemen usaha, serta pihak yang bertanggung jawab dalam memberdayakan nasabah KUR. Sementara untuk petani penerima SIDA, diperlukan sarana dan prasarana yang sesuai, kelembagaan dan dukungan pemerintah lokal. Demikian pula penduduk yang tinggal di kawasan rentan perubahan iklim diperlukan antara lain pemberdayaan meningkatkan pengetahuan lokal tentang perubahan variabel klimatik, pemberdayaan mengembangkan kegiatan produksi, dan pemberdayaan menyediakan bahan pangan.

Namun, untuk lebih merealisasi GK Ecopos, perlu segera dilakukan, antara lain, upaya menentukan indikator yang lebih terukur (*measurable*). Indikator itu, misalnya, indikator kemudahan akses permodalan, penumbuhan inovasi, adopsi teknologi, pemasaran, dan manajemen usaha bagi nasabah KUR. Sementara untuk petani penerima SIDA, indikator kuantitatif yang diperlukan ialah sarana dan prasarana yang sesuai, kelembagaan, dan dukungan pemerintah lokal. Demikian pula penduduk yang tinggal di kawasan rentan perubahan iklim, diperlukan antara lain indikator kuantitatif peningkatan pengetahuan lokal tentang perubahan variabel klimatik, kemampuan mengembangkan kegiatan produksi, dan ketersediaan bahan pangan.

Kuantifikasi dari semua indikator dari setiap dimensi dalam masing-masing variabel Ecopos mutlak diperlukan agar GK dan pemahaman kemiskinan Ecopos dapat lebih mudah diterjemahkan ke dalam bentuk strategi, kebijakan, dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih baik di satu pihak dan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan penduduk miskin di lain pihak. Itulah pekerjaan rumah sekaligus tantangan yang tidak boleh dihindari siapa pun dalam membawa Indonesia maju dan sejahtera.


DAFTAR PUSTAKA

- Asra, A. (2011). *Kemiskinan perkotaan: Perkembangan, determinan, dan strategi pengentasannya*. Jakarta: BPS/LIPI.
- Asra, A. (2014). *Esensi statistik bagi kebijakan publik*. Jakarta: In Media.

Bank Dunia. (2001). *World development report 2000*. Washington, D.C: World Bank.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.

INDEKS

- 
- absolute poverty 23, 51
Angka Kecukupan Gizi 36
ASEAN 21, 124
Asian Development Bank 43, 261
Asupan Energi Pangan 24, 35
- backward sloping supply curve 33
Badan Koordinasi Keluarga Berencana 19, 44
Badan Pertanahan Nasional 151
Bank Dunia 4, 5, 7, 8, 13, 32, 43, 46, 49, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 71, 75, 160, 162, 171, 172, 180, 181, 191, 193, 197, 201, 229, 243, 248, 249, 256
bankable 117, 135, 136
Bantuan Langsung Tunai 33, 40
Bantuan Operasional Sekolah 102
Bappeda 10, 172, 174, 179, 180
Berita resmi statistik 49
BPJS 102
BPS 1, 2, 4, 9, 13, 16, 18, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 55, 57, 74, 103, 104, 159, 160, 168, 173, 197, 245, 246, 255, 256, 261
- CBN 24, 25, 36, 37
Census Bureau 16, 53
- channeling agents 129
chronic poverty 29
consumption expenditure 35
- dana pihak ketiga 117
data longitudinal 23
decent work 77, 110, 113
Dewan Perwakilan Rakyat 18, 35
Direct Calorie Intake 24
- economic welfare 23
ECOPOS 1, 55, 57, 60, 69, 77, 87, 100, 115, 136, 147, 161, 166, 171, 180, 193, 194, 199, 236, 245, 246, 248, 253
eudemonic component 30
European Union 27
evaluative component 30
- facilitating empowerment strategy 59
financial burden 129
focus group discussion 10, 11, 56, 82, 148, 172, 175, 181, 201, 229
Food Energy Intake 24, 35
Forum Masyarakat Statistik 6
- Garis Kemiskinan Makanan 38
Garis Kemiskinan Total 38

- geographical poverty map 19
- GK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
16, 17, 24, 25, 26, 28, 30, 31,
32, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44,
55, 56, 57, 59, 60, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 160, 245, 246,
248, 249, 250, 251, 253, 255,
256
- green building 220
- Human Poverty Index 26
- indeks deprivasi agregat 27
- Indeks Harga Konsumen 37
- Indeks Kebahagiaan 20
- indeks kedalaman 1, 37
- indeks keparahan 1, 37
- indeks pembangunan manusia 119
- indirect intervention 19
- Indonesia Family Life Survey 44
- Inpres Desa Tertinggal 19, 40
- inseparability 128
- interchangeability of money 129
- International Labour Organization
113
- keluarga sejahtera 19, 160
- kemiskinan absolut 16, 17, 20, 23,
26, 27, 28, 32, 245, 246, 247
- kemiskinan alami 33
- Kemiskinan Budaya 33
- kemiskinan Ecopos 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 68, 81, 82, 84,
86, 87, 88, 89, 90, 95, 97, 99,
100, 101, 102, 104, 105, 110,
111, 112, 136, 145, 148, 162,
246, 251, 253, 254, 255, 256
- kemiskinan multidimensi 19, 32,
41, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 55,
145
- kemiskinan objektif 32
- kemiskinan relatif 23, 28, 32
- kemiskinan struktural 33, 34, 150,
166
- Kemiskinan subjektif 30
- KERJA LAYAK 77, 84, 87, 100
- kredit usaha rakyat 9, 145, 251
- kredit usaha tani 92
- life cycle 29
- LIPI 6, 50, 82, 114, 117, 145, 146,
173, 175, 176, 180, 191, 195,
197, 198, 244, 256, 262, 263,
264, 265
- malnutrition 24
- Millennium Development Goals
77
- monetary poverty indicator 26,
247
- moral hazard 128, 130
- MPI 27, 28
- multidimensi 4, 15, 18, 19, 20, 22,
24, 26, 27, 29, 32, 39, 41, 42,
45, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 82,
86, 110, 145, 161, 245, 247
- multidimensional 13, 15, 46, 47,
75, 122, 169, 197, 247
- Multiple Poverty Index 27
- natural poverty 33
- outsourcing 97
- participatory approach 88
- pedagang kaki lima 90, 91, 96, 99,
100, 102, 114, 155
- pemutusan hubungan kerja 118

Petugas Penyuluh Lapangan 10, 172
 Physical Quality of Life 26
 poverty by region 19
 poverty gap index 37
 poverty severity index 37
 Program Kemitraan Bina Lingkungan 139
 promoting opportunity strategy 59
 prudent manners 129
 public concern 35
 public fund 129
 Purchasing Power Parity 43

 rasionalitas 7
 recommended dietary daily allowance 24
 reforma agraria 10, 148, 151, 154, 156, 157, 163
 relative poverty 23
 repayment capability 129
 repayment capacity 127
 rumah tangga miskin 3, 24, 33, 40, 41, 56, 117, 134, 135, 143

 satuan kerja pemerintahan daerah 56
 sektor informal x, 5, 6, 8, 9, 12, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 110, 111, 112, 155, 156, 169, 246, 251
 self rated 30

 sharing poverty 153
 Sistem Inovasi Daerah 9, 173
 SMERU 6, 53
 social alienation 127
 social empowerment 126
 Social Weather Station 21
 stakeholders 195
 strategi adaptasi dan mitigasi 11, 199, 200, 201, 202, 203, 219, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242
 strategic default 128
 structural poverty 33
 subjective well-being 30, 50
 Survei Sosial Ekonomi Nasional 1, 35, 43
 Susenas 1, 35, 37, 38, 39, 40, 43
 sustainability 125, 146
 SWS 31, 51

 tenaga kerja Indonesia 150
 TNP2K 20, 41, 43, 44, 120, 146, 177, 198
 transient poverty 29

 UNESCO 202, 244, 264, 265
 unidimensional 15, 46, 55, 245, 247
 usaha mikro, kecil, dan menengah 107, 137

 vicious circle 121, 254

 War on Poverty 16
 working poor 102

—



BIOGRAFI PENULIS

Abuzar Asra, Prof., Dr, MA.,

Lahir di Jakarta; Awal 1976, lulus Akademi Ilmu Statistik (AIS), akhir 1979, menyelesaikan M.Sc. di University of Michigan, USA; dan awal 1989 menyelesaikan Ph.D. di Griffith University, Australia. Sejak awal 1976, bekerja di Badan Pusat Statistik (BPS); mencapai jenjang Ahli Peneliti Utama (APU) pada 1994 (merangkap Kepala Bagian Analisa dan Pengembangan Statistik Kependudukan, BPS). Sekitar 10 tahun bekerja di Asian Development Bank (ADB), Manila, Filipina dan dua tahun di Islamic Development Bank (IsDB), Jeddah, KSA. Pernah sebagai Visiting Fellow pada Research School of Pacific Studies, Australian National University, Australia; bekerja di Munich Center for Advanced Training, Munich, Jerman; dan menjadi Ketua Sekolah Tinggi Manajemen dan Informasi Komputer Muhammadiyah, Jakarta. Telah menulis sepuluh buku tentang statistik dan metode penelitian. Sekarang sebagai Profesor Riset di BPS dan mengajar di Politeknik Statistika STIS, Jakarta, serta sebagai dosen tidak tetap di Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, dan School of Government and Public Policy (SGPP), Jakarta. Mulai akhir 2018 berada di Islamic Development Bank (IDB), Jeddah, KSA sebagai konsultan internasional dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Agus Eko Nugroho, Dr. S.E.M.Appl.Econ.

Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (1993) bidang Ekonomi; memperoleh gelar Master di Massey University di Selandia baru (2001) bidang Ekonomi dan Keuangan; memperoleh gelar Doktor di Curtin University of Technology (2010) bidang Ekonomi dan Keuangan.

Bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI sejak tahun 1994. Jabatan fungsional dengan jenjang Peneliti Utama Gol IV/b. Telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah baik yang ditulis sendiri maupun dengan penulis lain dalam bentuk buku, jurnal, prosiding, dan makalah yang diterbitkan serta disampaikan dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional.

Carunia Mulya Firdausy

Adalah Professor Riset di Pusat Penelitian Ekonomi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), Jakarta dan juga sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi pada Universitas Tarumanagara (UN-TAR), Jakarta. Latar belakang pendidikan tinggi yang dimiliki yakni Ph. D dalam Ilmu Ekonomi dari *University of Queensland*, St. Lucia, Brisbane, Australia (1989-1992), Master Degree dalam bidang *Agricultural Development Economics* dari Australian National University (ANU), Canberra, Australia (1983-1986) dan *Master Degree of Economics*, University of New Castle, Australia (1987-1989). Pendidikan Sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor, Bogor (1981). Beberapa publikasi ilmiah Internasional dalam buku bunga rampai yang diterbitkan antara lain oleh ISEAS (Institute of South East Asian Studies), UN-ESCAP, ILO, Toyota Foundation, UNIDO, UNDP, UNCTAD, Palgrave Macmillan, dan Taylor Francis Group. Sedangkan artikel dalam jurnal internasional bereputasi telah diterbitkan antara lain dalam *Asian*

Development Review (ADB), Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES), Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), East Asian Development Network (EADN), Fisheries Economic Journal, Malaysian Economic Journal, Journal of Economic Development, International Journal of Social Economics, International Journal of Management Science and Business Administration dan International Journal of Critical Infrastructure. Selain itu, banyak tulisan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah nasional maupun dalam surat kabar nasional. Bidang studi dan penelitian yang menjadi fokus utama adalah bidang ekonomi pembangunan, investasi, perdagangan, lingkungan dan manajemen. Juga menjadi international reviewer untuk jurnal internasional bereputasi seperti *International Journal of Economics and Business Studies Journal of Social and Economic Science, International Journal of Development Research and Quantitative Techniques, dan international journal of social economics.* Email address: cmfirdausy@gmail.com

Lilis Mulyani

Adalah peneliti bidang hukum di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Saat ini tengah menyelesaikan studi doktoral di bidang Hukum di Melbourne Law School, University of Melbourne, Victoria, Australia. Lilis menekuni riset di bidang hukum agraria, *critical agrarian study*, hak asasi manusia dan *group's land rights*. Semasa bertugas di LIPI, Lilis juga aktif mengajar metodologi hukum, khususnya terkait hukum dan masyarakat; menjadi Editor di beberapa majalah ilmiah di Indonesia, diantaranya Jurnal Bhumi, Jurnal Hukum dan Peradilan. Beberapa publikasi terakhirnya adalah "Gambling with the State: Legal Personhood Among Urban Poor Indonesia" (AJLS, 2015). Agrarian Reform in Indonesia (2011); Indonesia's Migrant Workers (2013); Legalising Land Rights and Poverty (2011); and Resolving Land Conflict in Indonesia (2014).

Nawawi

Menyelesaikan Sarjana (S1) dalam bidang ekonomi dan pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang Jawa Tengah tahun 1999. Menyelesaikan studi dalam program *Master of Arts in Humanities*, pada Department of Area Studies, Graduate School of Humanities and Social Sciences, Mie University, Japan, 2010. Pada saat ini sedang mengikuti program Doktor DI Leed University, Engkand. Telah banyak melakukan penelitian dalam bidang ketenagakerjaan baik yang dipublikasikan di jurnal dalam negeri maupun di jurnal internasional.

Purwanto

Lahir di Sragen pada 18 Februari 1961 adalah Profesor di bidang Etnobiologi di Pusat Penelitian Biologi, LIPI dan dia lulusan Departemen Agronomi, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta pada tahun 1984, memperoleh gelar DEA (*Diplôme Etude Approfondie*) di *Ecologie Générale et Production Végétale, Université Pierre er Marie Curie* (Université Paris 6), Paris, Prancis pada tahun 1994 dan Doktornya dari Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), Paris, Prancis, pada tahun 1997. Disertasinya tentang "*Gestion de la biodiversite: Relation aux plantes et dynamiques végétales Chez Les Dani de la vallée de la Baliem dan Irian Jaya, Indonésie*". Sejak ia memulai karir profesionalnya, ia konsisten dalam mengurai hubungan terjalin sumber daya alam di Indonesia dengan pembangunan berkelanjutan, terutama pada sumber daya keanekaragaman hayati. Dia bergabung dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 1985 dan menjadi Direktur Eksekutif Komite Nasional Program MAB-UNESCO Indonesia, LIPI pada tahun 2008 - Sekarang. Sebagai peneliti memiliki pengalaman memimpin penelitian lapangan Etnobotani di hampir seluruh provinsi di Indonesia dan ekspedisi

di beberapa kawasan Indonesia seperti (E-Win) Ekspedisi Widya Nusantara ke Raja Ampat Papua Barat tahun 2006-2008), dan anggota program penelitian kerjasama internasional seperti ES-IOP (*Etude des Sociétés de l'Indonésie Orientale et Périphérique*) Program, Foresasia, TLUP (Tanimbar Land Used Program) dan COLUPSIA (*Collaborative land use planning and sustainable institutional arrangements for strengthening land tenure, forest and community rights in Indonesia*), PCE (Population, Consumption, Environment) and Coastal Management Project in South Sulawesi; dan lain-lainnya. Penghargaan: Ia menerima penghargaan dari UNESCO melalui Representative/Director UNESCO Office Jakarta (2015) sebagai pengakuan atas dukungan jangka panjang dan kontribusi untuk program ilmu alam UNESCO di wilayah Asia dan Pasifik, khususnya di bidang ilmu lingkungan. Dia juga menerima penghargaan Satya Lencana Karya selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun sebagai pemerintah resmi dari Presiden Republik Indonesia.

Rachmini Saparita

lahir di Garut, Jawa Barat. Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (1982) bidang Statistika; memperoleh gelar Diploma di LSE University of London (1987); memperoleh gelar Magister Teknik di Institut Teknologi Bandung (1994), bidang Teknik dan Manajemen Industri; memperoleh gelar Doktor di Universitas Padjadjaran (2004) bidang Sosial Ekonomi Pertanian, memperoleh Gelar Profesor Riset dari LIPI untuk Bidang Informasi dan Komunikasi Pertanian (2017). Bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI sejak tahun 1982. Jabatan fungsional dengan jenjang Peneliti Utama Gol IV/e. Telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah baik yang ditulis sendiri maupun dengan penulis lain dalam bentuk buku, jurnal, prosiding, dan makalah yang diterbitkan serta disampaikan dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional.

